

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ashofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Pt Rineka Cipta, 2001.
- Arief, Barda Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum: Cet. Iii. Sinar Grafika, 2011.
- Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Kencana, 2013.
- Arief Amrullah, M. Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak Dan Permasalahan Penegakan Hukum. Prenadamedia Group, 2018.
- Agustinus Herimulyanto, Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Teori Dan Terapan Value-Based Confiscation System Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019
- Adrian Sutedi, S. H. Hukum Keuangan Negara. Sinar Grafika, 2022.
- Danil, Elwi. Korupsi: Konsep. Tindak Pidana. Dan Pemberantasannya: Cetakan Ke-3. Rajagrafindo Persada, 2014.
- F. Sjawie, Hasbullah. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi. Kencana, 2017.
- Gede Atmadja, I Dewa Dan Putu Budiarta, I Nyoman. Teori-Teori Hukum. Setara Press, 2018.
- Hamel, Van. Theorieen Over Strafrecht. A.W. Sijthoff, 1948.
- Hanitijo Soemitro, Ronny Metodologi Penelitian. Ghalia Indonesia, 1982.
- Hussain Alatas, Syed. Korupsi. Sifat. Sebab Dan Fungsi. Lp3es, 1987.
- Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional: Edisi Revisi. Rajagrafindo Persada, 2007.
- Hafidz Arsyad, Jawade. Korupsi Dalam Perspektif Han (Hukum Administrasi Negara). Sinar Grafika, 2013.
- Hotmaulana Hutaaruk, Rufinus. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Sinar Grafika, 2013.

- Hs, Salim Dan Septiana Nurbani, Erlies. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis: Buku Ketiga. Rajagrafindo Persada, 2014.
- Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika, 2017.
- Hr, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers, 2018.
- Kade Budhi H, I Gusti. Hukum Pidana Progresif: Konsep Dan Penerapan Dalam Perkara Pidana. Rajawali Pers, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Liberty, 1996.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Bina Aksara, 2002.
- M. Hadjon, Philipus. Dan Sri Djamiati, Tatiek. Argumentasi Hukum. Gadjah Mada University Press, 2005.
- Muhammad Djafar Saidi, Eka Merdekawati Djafar, 2008. Hukum Keuangan Negara Teori Dan Praktik, Depok, Rajawali Pers.
- Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Kencana-Prenada Media Group, 2014.
- Muladi Dan Priyatno, Dwidja. Pertanggung-Jawaban Pidana Korporasi: Edisi Ketiga. Prenadamedia Group, 2015.
- Mulyana, Asep N. Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis. Jakarta: Grasindo, 2019.
- Mulyadi, Lilik. Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Kencana, 2020.
- _____. Membangun Model Ideal Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan. Kencana, 2021.
- Md Shodiq, Budaya Hukum, Vol. 17, Vols. (Sumatera Barat: Pt Mafy Media Literasi Indonesia, 2023).
- Nelson, Febby Mutiara. Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Nugraha, Yudhistira. Optimalisasi Asas Oportunitas Dalam Kewenangan Jaksa. Bandung: Unpar Press, 2020.

- Nelson, Febby Mutiara, *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Nur Hidayat, Syarif. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Pidana. Pengembalian Kerugian Negara Menghentikan Proses Penanganan Korupsi*. Fh Uii Press, 2022.
- Omar Sharif Hiariej, Edward. *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Pt Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rai Setiabudhi, Ik. *Ruang Gerak Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi*. Udayana University Press, 2013.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Dan Kausa Yang Halal*. Yogyakarta: Fh Uii, 2013.
- Robert K., 2019, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan: Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*, Ed. 1, Cet. 2, Rajawali Pers, Depok.
- Sudarto, S. "Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Masalah-Masalah Hukum." Semarang: Fh Undip (1987).
- _____. *Hukum Pidana I*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, 1996.
- Suharto, R.M. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Selukbeluknya*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- S, Supardi. *Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan*. Prenadamedia Group, 2018.
- Sumedana, Ketut. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*. Genta Publishing, 2020.
- Taufiq, Muhammad. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Pustaka Pelajar, 2014.
- Wignyodipuro, Surojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Gunung Agung, 1982.

Widyo Pramono, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Alumni, Bandung, Hlm. 145.

Widijowati, Dijan Dan Darmawan, Halim. *Pembaharuan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi: Cetakan I. Cv. Literasi Nusantara Abadi*, 2022

Jurnal

Akbar, Muhammad Fatahillah. "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51.3 (2021): 803-823.

Al Faridzi. Mohammad. And Gunawan Nachrawi. "Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid. Sus/2021)." *Jurnal Kewarganegaraan* 6. No. 2. (2022): 3014-3019.

Arlen, Jennifer. "Prosecuting Beyond The Rule Of Law: Corporate Mandates Imposed Through Deferred Prosecution Agreements." *Journal Of Legal Analysis* 8.1 (2016): 191-234.

Ach Raziqin, Ainun Najib, And Moh Ali Hofi, "Konsep Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Progresif" *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. 3.April (2025): 54–62.

Ahmad Iqbal, 2020, *Penerapan Deferred Prosecution Agreement Di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, H. 219.

Cynthia Cornelia Leasa, Sherly Adam, And Jacob Hattu, "Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana" *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*. 4.6 (2024): 479.

Dahoklory, Madaskolay Viktoris. "Dinamika Pengelolaan Keuangan Bumh Perihal Dilema Antara Kerugian Negara Ataupun Kerugian Bisnis." *Jurnal Rechtsvinding* 3 (2020).

Ellis W. Martin, 2014, *Deferred Prosecution Agreements: Too Big To Jail And The Potential Of Judicial Oversight Combined With Congressional Legislation*, *North Carolina Banking Institute*, Vol. 18, Issue 2, H. 464-467.

- Endang Darmaayu. (2025). Strategi Hukum Pidana Internasional Dalam Pemulihan Aset (Asset Recovery) Terhadap Kejahatan Korupsi Dikaitkan Dengan Hukum Pidana Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 4(1), 407–418.
<https://doi.org/10.59066/Jel.V4i1.1244>
- Fitriyanti, Lisa Dwi, And Agus Suwandono. "Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 3.3 (2025): 13-27.
- Fakhruddin Odhy, "Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi Di Indonesia" *Dharmasiswa*. 1.1 (2021): 190, Available: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss1/30>.
- Frans, Mardian Putra, Et Al. "Plea Bargaining System, Deffered Prosecution Agreement, Dan Judicial Scrutiny Sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan." *Perspektif Hukum* (2024): 147-173.
- Ferdian, Ardi. "Konsep Deferred Prosecution Agreement (Dpa) Dalam Pertanggung-Jawaban Pidana Korporasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Arena Hukum* 14.3 (2021): 523-545.
- Ghozali, E. (2024). Kebijakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti:(Policy Return State Financial To Corruption Criminal Through Payment Of Replacement Money). *Jurnal Hukum Justice*, 153-162.
- Haswandi, Haswandi. "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6.1 (2017): 145-172.
- Hilipito, Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut Kuhp." *Lex Privatum* 4.5 (2016).

- Herlina Manullang Ikhtiar Elvisman Hia, “Peran Kejaksaan Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara” *Jurnal Dimensi Hukum*. 8.1 (2024): 18.
- Hariman Satria. Desember 2018. Pembuktian Kesalahan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. 4. No. 2. (2018): 25-53.
- Hariman Satria, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam”, *Mimbar Hukum*, 28. No. 2. (2016): 288-300.
- I Made Santiawan Dan Gde Made Swardhana, 2021, Konsep Deferred Prosecution Agreement (Dpa) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 6, H. 1045.
- I. Munzil. F.. “Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Pengganti Dalam Rngka Melindungan Hak Ekonomi Negara Dan Kepastianungan Hak Ekonomi Negara Dan Kepastian Hukum” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 22. No.1. (2015): 25–53.
- Jannah, W., & Najemi, N. (2020). Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pampas Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 2(2), 101–115.
- Joseph G. Block Dan David L. Feinberg, Februari 2010, Look Before You Leap: Dpa, Npas, And The Environmental Criminal Case, *Ali-Aba Business Law Course Materials Journal*, H.8.
- Karunia. A. A.. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*. 10. No. 1. (2018): 115–128.
- Lalu Apriliansah And Hudi Yusuf, “Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Ekonomi : Studi Pada Kasus Pencucian Uang Di Indonesia” *Jicn: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*. 1.6 (2025): 9927, Available: <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/download/1869/2030>.

- Lambok Marisi Jakobus Sidabutar. “Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti” *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. 5. No. 2. (2019): 75–86.
- Mahmud, M. (2017). *Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Korelasinya Terhadap Kerugian Negara*. *Mimbar Justitia*, 1(2), 90–105.
- Manihuruk, T. N. S., & Daeng, M. Y. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru. *Justitia Jurnal Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.30651/Justitia.V6i02.5267>
- Muhammad Fatahillah Akbar, “Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan” *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 51.3 (2021): 805–807, Available: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhphttps://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss3/15>.
- Mawardi Recovery Et Al., “Recovery Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam” (2015): 74–92.
- Muhammad Ridho Sinaga. *Konsep Deferred Prosecution Agreement (Dpa) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia*. De Lega Lata *Jurnal Ilmu Hukum*. 6 No. 1. (2021). 81.
- Nelson, Febby Mutiara. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement?." *Simbur Cahaya* (2019): 230–253.
- Noviyanti, N., Danil, D., & Yoserwan, Y. (2019). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Wawasan Yuridika*, 3(2), 225–240.
- Novenda Amellia Sandra Pramaissella, Nurul Umi Ati, And Retno Wulan Sekarsari, “Implementasi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kantor Kejaksaan Negeri Batu)” *Jurnal Respon Publik*. 15.2 (2021): 89.

- Nugroho, Titis Adityo. "Efektivitas Hukum Perlindungan Rahasia Dagang Pada Negara Common Law, Civil Law Dan Islamic Law." *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti* (2025): 9-25.
- Negotiated Settlements In Corporate Crime: Examining Prosecution, Non-Prosecution, And Deferred Prosecution Agreements. (2025). *International Journal Of Law, Crime And Justice*, 5(03), 01-05. <https://doi.org/10.55640/>
- Palguna, A., & Ariawan, I. (2018). Analisis Yuridis Pembebanan Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, , 1-15. Retrieved From <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/41993>
- Rahim, Abdur, Ahadul Fitri Hakim, Arip Purnama, Elha Al Hafitsyah, And Fairuz Zahira. "Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003." *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, No. 9 (2023): 7012-7018.
- Rambey, Guntur. "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1.1 (2016): 137-161.
- Rizhan, Afrinald. "Tinjauan Yuridis Upaya Mengembalikan Public Trust Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum)." *Kodifikasi* 5, No. 1 (2023): 1-15.
- Rahmadani Putri Erdiyanti Putri And Abelia Duta Simanjutak, "Strategi Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*. 2.2 (2025): 105–117.
- Rahardjo. Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1. No. 1. (2005): 1-24.
- Sari, Fianka Bella, Elis Rusmiati, And Tri Handayani. "Analisis Yuridis Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata Sehingga Mengakibatkan Putusan Lepas." *Journal Of Syntax Literate* 8, No. 4 (2023).

- Satria, H. (2018). Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(1), 87-114. <https://doi.org/10.32697/Integritas.V3i1.142>
- Syahrir, Khairil Andi, M. Said Karim, And Hijrah Adhyanti Mirzana. "Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Tumou Tou Law Review* (2022): 32-47.
- Sidabutar, L. M. J. (2019). Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 75-86. <https://doi.org/10.32697/Integritas.V5i2.474>
- Sukesti, Yuni, Sudarto Sudarto, And Ardison Asri. "Pertanggung Jawaban Dalam Pendanaan Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 14, No. 2 (2024).
- Sinaga, Muhammad Ridho. "Konsep Deffered Prosecution Agreement (Dpa) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 (2021): 80-97.
- Simanjuntak, Melva Retta Ruby And Nelson, Febby Mutiara (2024) "Antara Tuntutan Dan Kesepakatan: Blbi Dan Era Deferred Prosecution Agreement," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 54: No. 1, Article 4. Doi: 10.21143/Jhp.Vol54.No1.1592
- Sudjana. 'Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000'. *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*. 2. No 1. (2019): 78–94.
- Ugra Jagiwirata, I., & Ratna Maharani, I. (2023). Pengaturan Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 11(10), 2289-2299. Doi:10.24843/Ks.2023.V11.I10.P04
- Wirna Rosmely Yusuf, M, Fahmiron, "Eksekusi Terhadap Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Padang

(Studi Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn Pdg)” Unes Law Review. 1.1 (2018): 65.

Yoserwan. Yoserwan. "Corporate Criminal Liability In Tax Crime: An Effort To Optimize State Revenue From The Tax Sector." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 23. No. 1. (2023): 131-142.

Tesis Dan Disertasi

Arinto, Kusumo. Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Putusan Serta Merta Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Tesis Magister Ilmu Hukum. Universitas Lampung, 2023.

Sukedi, M. (2023). Urgensi Kebijakan Formulatif Perjanjian Penangguhan Penuntutan (Deferred Prosecution Agreement) Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Disertasi Doktor, Universitas Udayana)

Wijaya, Ari Dody. Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, 2020.

Wahid, Mochamad Ananda Wyman. Politik Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Diss. Uns (Sebelas Maret University), 2024.

Website

https://www.beacukai.go.id/berita/penanganan-barang-hasil-penindakan-beacukai.html?utm_source=chatgpt.com

https://pn-semarangkota.go.id/web/pidana-pembayaran-uang-pengganti-sebagai-recovery-kerugian-keuangan-negara-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/?utm_source=chatgpt.com#_ftn5

https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/#_ftn7

<https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-hakim-tipikor-melanggar-uukorupsi-hol15030/?page=1>

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cd943c09ae3b/kenali-dpa-npa-](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cd943c09ae3b/kenali-dpa-npa-perjanjian-penangguhan-penuntutan-dalam-kejahatan-bisnis/?Page=All)

[Perjanjian- Penangguhan-Penuntutan-Dalam-Kejahatan-Bisnis/?Page=All](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cd943c09ae3b/kenali-dpa-npa-perjanjian-penangguhan-penuntutan-dalam-kejahatan-bisnis/?Page=All)

[https://antikorupsi.org/id/article/jaksa-dapat-kesampingkan-bibit-samad-rianto-](https://antikorupsi.org/id/article/jaksa-dapat-kesampingkan-bibit-samad-rianto-dan-chandra-m-hamzah-melawan)

[Dan-Chandra-M-Hamzah-Melawan](https://antikorupsi.org/id/article/jaksa-dapat-kesampingkan-bibit-samad-rianto-dan-chandra-m-hamzah-melawan)

<https://www.justice.gov/archive/dag/cftf/chargingdocs/Monsantoagreement.pdf>

Josie Welland, “Deferred Prosecution Agreements: A Comparison Of The Us And Uk”,

[https://www.legal500.com/developments/thought-](https://www.legal500.com/developments/thought-leadership/deferred-prosecution-agreements-a-comparison-of-the-us-and-uk/)
[Leadership/Deferred-Prosecution-Agreements-A-Comparison-Of-The-Us-And-](https://www.legal500.com/developments/thought-leadership/deferred-prosecution-agreements-a-comparison-of-the-us-and-uk/)
[Uk/](https://www.legal500.com/developments/thought-leadership/deferred-prosecution-agreements-a-comparison-of-the-us-and-uk/)

[https://www.sfo.gov.uk/2020/01/31/sfo-enters-into-e991m-deferred-prosecution-](https://www.sfo.gov.uk/2020/01/31/sfo-enters-into-e991m-deferred-prosecution-agreement-with-airbus-as-part-of-a-e3-6bn-global-resolution/)
[Agreement-With-Airbus-As-Part-Of-A-E3-6bn-Global-Resolution/](https://www.sfo.gov.uk/2020/01/31/sfo-enters-into-e991m-deferred-prosecution-agreement-with-airbus-as-part-of-a-e3-6bn-global-resolution/)

[https://www.cnbcindonesia.com/market/20211214153411-17-299198/im2-bubar-](https://www.cnbcindonesia.com/market/20211214153411-17-299198/im2-bubar-gaji-dan-hak-karyawan-masih-terkatung-katung/2)
[Gaji-Dan-Hak-Karyawan-Masih-Terkatung-Katung/2](https://www.cnbcindonesia.com/market/20211214153411-17-299198/im2-bubar-gaji-dan-hak-karyawan-masih-terkatung-katung/2)

Pusat Edukasi Anti Korupsi. “Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Yang Ditimbulkannya”.

[https://aclc.kpk.go.id/aksi-](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya)
[Informasi/Eksplorasi/20240229-Korupsi-Dan-Kerugian-Keuangan-Negara-](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya)
[Yang-Ditimbulkannya](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya)

Indonesia Corruption Watch. “Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023”.

<https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2023>